



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI DENGAN
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DAN
KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan	: V
Rapat ke-	: --
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari & Tanggal Rapat	: Rabu, 12 Juni 2024
Waktu Rapat	: Pukul 10.30 s.d. 12.27 WIB.
Tempat Rapat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI / KK.III Gedung Nusantara I DPR RI Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Ketua Rapat	: Drs. H. Syamsurizal, S.E., M.M. (Wakil Ketua/F-PPP)
Acara Rapat	: 1. Pembicaraan Pendahuluan Pembahasan RAPBN T.A. 2025; 2. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025; dan 3. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 sampai dengan Bulan Mei Tahun 2024
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H. (Kabag Set. Komisi II DPR RI)
Hadir	: 18 dari 49 orang Anggota dengan rincian: A. ANGGOTA DPR RI PIMPINAN: 1. Saan Mustopa, M.Si. (Wakil Ketua/F-NASDEM) 1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 4 orang Anggota dari 11 Anggota 1. Komarudin Watubun, S.H., M.H. 2. Ir. H. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc. 3. Drs. Cornelius, M.H. 4. Ir. Hugua

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
2 orang Anggota dari 7 Anggota
 1. Ir. H. Arsyadjulandi Rachma, M.B.A
 2. A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, M.H., M.Kn.
3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3 orang Anggota dari 7 Anggota
 1. Heri Gunawan, S.E.
 2. H. Rahmat Muhajirin, S.H.
 3. Drs. Difriadi
4. FRAKSI PARTAI NASDEM
3 orang Anggota dari 5 Anggota
 1. Aminurokhman, S.E., M.M.
 2. Kamran Muchtar Podomi, S.T.
5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
0 orang Anggota dari 4 Anggota
-
6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
1 orang Anggota dari 5 Anggota
 1. Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M.
7. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
1 orang Anggota dari 4 Anggota
 1. Teddy Setiadi, S.I.Kom
8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
2 orang Anggota dari 4 Anggota
 1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
 2. Khairul Muhtar, S.E., M.M.
9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
1 orang Anggota dari 2 Anggota
 1. Dra. H. Munawaroh

ANGGOTA YANG IZIN/SAKIT

1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si. (F-PG)
2. Drs. H. Chairul Anwar, Apt (F-PKS)
3. Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng (F-PKS)

B. UNDANGAN

1. Kepala Lembaga Administrasi Negara RI
(Dr. Muhammad Taufiq);
2. Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik
Indonesia (Rini Agustiani, S.H., M.A.P.);
3. Ketua OMBUDSMAN RI
(Mokhammad Najih, S.H., M.Hum., Ph.D.).

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.SI., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. NASDEM):

**Yang terhormat kepada Ketua LAN beserta jajarannya,
Yang terhormat kepada Saudara Kepala ANRI beserta jajarannya,
Yang terhormat Saudara Ketua ORI beserta jajarannya,
Yang terhormat para Anggota Komisi II DPR RI,**

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat *Allah Subhanahu Wa Taala* Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas perkenannya kita dapat menghadiri Rapat Komisi II DPR RI dengan LAN, ANRI, ORI dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional di bidang anggaran pada hari ini dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

Sesuai dengan laporan sekretariat, rapat hari ini daftar hadir telah ditandatangani, sudah tujuh fraksi dari sembilan fraksi. Oleh karena itu, kuorum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI. Maka, perkenankan kami membuka rapat ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB)

Selanjutnya, kami menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudara atas kesediaannya memenuhi undangan dalam rapat hari ini. Demikian juga kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Sesuai dengan jadwal atau siklus anggaran yang dikeluarkan oleh Badan Anggaran DPR RI, menugaskan kepada seluruh komisi-komisi agar melakukan rapat dengan mitra kerjanya dalam rangka membahas RKA-KL dan RKP-KL Tahun 2025 yang hasilnya nanti akan disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI.

Oleh karena itu, kami akan menawarkan sekaligus meminta persetujuan mengenai acara rapat atau rapat kerja atau rapat dengar pendapat pada hari ini, yaitu Pembicaraan Pendahuluan Pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2025, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 sampai dengan Bulan Mei Tahun 2024.

Saya mohon persetujuan rapat kita akhiri sampai jam 11.00.

Bahwa rapat hari ini adalah dalam rangka menjalankan salah satu fungsi DPR RI yaitu fungsi anggaran. Oleh karena itu, Komisi II DPR RI ingin mendengarkan penyampaian penjelasan dalam Rangka Pembicaraan Pendahuluan Pembahasan RAPBN Tahun 2025, Rencana Kerja Tahun Pemerintah Tahun 2025, dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 sampai Bulan Mei Tahun 2024.

Untuk mempersingkat waktu, kami mempersilakan kepada saudara-saudara untuk menyampaikan penjelasannya.

Saya mulai dari Kepala LAN, silakan.

PLT. KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI (Dr. MUHAMMAD TAUFIQ):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi,

Salam sejahtera bagi kita semuanya,

**Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,
Yang saya hormati Kepala Arsip Nasional RI beserta jajaran,
Yang saya hormati Ketua Ombudsman Republik Indonesia beserta
jajaran,**

Menindaklanjuti undangan dari Wakil Ketua DPR RI tanggal 20 Mei 2024, dalam kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan informasi berkaitan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 sampai dengan Bulan Mei untuk Lembaga Administrasi Negara.

Namun sebelumnya, perkenankan kami menyampaikan terima kasih. Apresiasi kepada para Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II DPR RI atas dukungan serta kemitraan yang sangat baik pada tahun-tahun sebelumnya sehingga LAN dapat berkinerja secara maksimal untuk melayani bangsa.

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati,

Lembaga Administrasi Negara merupakan lembaga pemerintah *non-kementerian* yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pengkajian dan inovasi administrasi negara, pengkajian dan inovasi manajemen ASN, serta pembinaan dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN dan penyelenggaraan pendidikan terapan administrasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LAN, terdapat beberapa capaian besar LAN yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini sebagai berikut:

1. Yang pertama, transformasi pengembangan kompetensi ASN. Lembaga Administrasi Negara telah melakukan transformasi di bidang pengembangan kompetensi ASN dan melakukan perubahan pendekatan pengembangan kompetensi yang menonjolkan cara-cara yang inovatif, yang kreatif, dan mampu menjangkau seluruh ASN di Indonesia. Selain itu, dilakukan pula digitalisasi perubahan kompetensi ASN melalui pemanfaatan seputar teknologi terkini

- seperti AI sehingga mampu menciptakan pembelajaran terintegrasi bagi seluruh ASN di Indonesia.
2. Yang kedua, transformasi pelayanan publik melalui fasilitasi akselerasi inovasi di instansi pemerintah. Sejak 2015 hingga saat ini, LAN menjalankan kegiatan Laboratorium Inovasi yang dilandasi dengan komitmen yang tinggi untuk meningkatkan induk, indeks inovasi daerah dan indeks pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan target-target yang ditetapkan Pemerintah untuk meningkatkan daya saing serta kesejahteraan masyarakat. Hingga 2023, telah dihasilkan Laboratorium Inovasi di seluruh Indonesia sebagaimana di peta yang menghasilkan 13.072 ide-ide induk inovasi. Iya, sesuai kebutuhan daerah yang disinergikan dengan kebutuhan daerah.
 3. Yang ketiga adalah dalam pencapaian reformasi birokrasi yang dilakukan Lembaga Administrasi Negara di mana LAN telah mendapatkan berbagai penghargaan atas capaian dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang antara lain adalah:
 - a. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian 16 kali berturut-turut; kemudian
 - b. Peringkat tertinggi Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik untuk kategori LPNK, LNS, dan instansi lainnya;
 - c. Predikat "Sangat Memuaskan" atau AA yang kelima kali dari ANRI;
 - d. Penghargaan Meritokrasi dari KASN yang ketiga kali;
 - e. Kategori atau penghargaan "Terjaga" dari KPK di tahun 2023; kemudian
 - f. Predikat badan publik dan kualifikasi informatif untuk yang keempat kali; dan
 - g. Kategori "Sangat Baik" untuk Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional; serta
 - h. Peringkat kedua terbaik untuk Indeks Kualitas Kebijakan.

Semua capaian dalam reformasi birokrasi ini tentunya tidak lepas dari arahan, dukungan dari Pimpinan dan Anggota Dewan.

Dan selanjutnya kami akan masuk pada pokok bahasan pertama perihal Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Lembaga Administrasi Negara Tahun 2023.

Pagu Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp329.099.461.000,00 bersumber dari rupiah murni dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Adapun Realisasi Anggaran Tahun 2023 adalah sebesar 99,30% dengan rincian sebagai berikut:

1. Dukungan Manajemen 99,37%; serta
2. Kebijakan Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN sebesar 99,50,5%.

Berbagai *output* juga telah dihasilkan oleh LAN dari pemanfaatan anggaran tahun 2023 sebagai berikut:

- Yaitu, telaah kebijakan dan isu strategis bidang administrasi negara dan manajemen ASN;
- Pendampingan laboratorium inovasi kabupaten/kota; kemudian
- Yang ketiga adalah inovasi konsep/model ASN Merdeka Belajar;

- Inovasi strategi pengembangan kapasitas lembaga pelatihan;
- Pembaruan kebijakan-kebijakan pengembangan kompetensi dengan pendekatan kekinian;
- Akreditasi terhadap lembaga-lembaga pelatihan; serta
- Pengembangan-pengembangan bagi 296.199 pegawai P3K seluruh Indonesia secara gratis.

Di samping capaian di atas, LAN juga mendukung pencapaian Program Prioritas Nasional untuk memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dari tujuh amanat kegiatan yang menjadi prioritas nasional dengan capaian 100%. Secara umum, capaian dapat, capaian tersebut dapat kami sebutkan secara singkat sebagai berikut:

- Yang pertama adalah penyediaan konten-konten pembelajaran dengan teknologi terkini;
- Yang kedua adalah kebijakan pelatihan *smart governance* bagi jabatan fungsional untuk memperkuat kompetensi mereka;
- Yang ketiga adalah rumusan hasil evaluasi pelaksanaan pelatihan yang menunjukkan bukti nyata kemanfaatan; kemudian
- Yang keempat adalah peran dan kompetensi widyaiswara yang semakin meningkat dengan pemanfaatan teknologi terkini; serta
- Kolaborasi eksekutif nasional sebagaimana dituangkan dalam Program Eksekutif Nasional.

**Pimpinan Anggota Komisi II, serta
Hadirin yang saya hormati,**

Saat ini kita telah memasuki bulan Juni tahun 2024, izinkan kami menyampaikan pokok bahasan kedua terkait Progres Pelaksanaan Anggaran LAN Tahun 2024.

Pagu Anggaran LAN Tahun 2024 sebesar Rp312.277.135.000,00 yang bersumber dari rupiah murni dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Secara rinci, komik, komposisi pengalokasian anggaran per program dan sumber dana tahun 2024 sebagaimana kami cantumkan dalam tabel 4:

- Pertama, Program Dukungan Manajemen, total Rp249.329.979.000,00;
- Yang kedua, Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN sebesar Rp62.964.156.000,00.
- Total adalah Rp312.277.135.000,00.

Dalam kesempatan yang baik ini, perlu kami laporkan bahwa sampai dengan 11 Juni 2024, realisasi anggaran LAN mencapai 39,30% di mana hal ini masih sejalan dengan target pemanfaatan anggaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Adapun progres pelaksanaan kegiatan LAN sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut:

- Yang pertama adalah Laboratorium RB Tematik di beberapa Pemerintah Daerah untuk memperkuat RB berdampak;

- Yang kedua adalah Tujuh Telaah Isu Strategis yang mendukung transformasi administrasi negara;
- Yang ketiga adalah Penyusunan Direktori Inovasi Satu Sehat dan Penyusunan Instrumen Pengukuran Dampak Inovasi;
- Yang ketiga ada Penyusunan Berbagai Kebijakan Pengembangan Kompetensi bagi Penguatan Para Jabatan Fungsional; dan
- Telah dilakukan penyusunan penguatan-penguatan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan bagi ASN.

**Pimpinan,
Anggota, dan
Hadirin yang saya banggakan,**

Selanjutnya, menginjak pada pokok bahasan ketiga kami melaporkan perihal Rencana Kerja LAN Tahun 2025.

Pagu Indikatif LAN Tahun 2025 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan Nomor S-346/MK.02/2024 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.201/D.8/2024 tentang Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga dan Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp315.388.668.000,00. Dibanding dengan pagu tahun 2024, terjadi kenaikan pagu sebesar Rp3.111.533.000,00 atau sebesar 1%.

Sebagaimana pada tahun sebelumnya, Pagu Indikatif LAN Tahun 2025 juga bersumber dari rupiah murni dan penerimaan PNBPN dan akan dialokasikan pada Program Dukungan Manajemen dan Program Kebijakan Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN.

Secara rinci, komposisi rencana pengalokasian anggaran per-program dan sumber dana tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Yang pertama adalah Dukungan Manajemen total Rp258.514.021.000,00; dan
2. Kebijakan Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN sebesar Rp56.874.647.000,00.

Pengalokasian anggaran lebih lanjut ke dalam kegiatan-kegiatan dilakukan dengan mengacu Rencana Kerja Pemerintah 2025 atau RKP 2025 dari hasil pertemuan *trilateral meeting* antara Lembaga Administrasi Negara dan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Mengenai penyusunan Rancangan Renja Tahun 2025 telah disepakati bahwa Lembaga Administrasi Negara berperan mendukung prioritas nasional melalui pencapaian target *output* sebanyak tiga rincian *output* sebagaimana berikut:

- Yang pertama, *Piloting Pengembangan Kompetensi Tematik di Daerah Tertinggal*, yang kedua, dengan sebesar anggaran Rp600.000.000,00
- Yang kedua adalah Rencana Pengembangan Kompetensi Nasional atau *Human Capital Development Plan* yang mendukung RPJMN sebesar Rp500.000.000,00; dan

- Yang ketiga adalah penyelenggaraan ASN *Talent Academy* sebesar Rp1.400.000.000,00.
- Dan total keseluruhan adalah Rp2.500.000.000,00.

Selain kegiatan yang bersifat nasional, Pagu Anggaran LAN Tahun 2025 juga direncanakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LAN sebagaimana berikut:

1. Yang pertama terkait dengan Dukungan Manajemen, yaitu:
 - Untuk gaji dan tunjangan kinerja; kemudian
 - Yang kedua adalah operasional pemeliharaan kantor,
 - Peningkatan Sarpras aparatur Lembaga Administrasi Negara; serta
 - *Non* operasional lain pendukung tuisi.
2. Yang kedua untuk Kebijakan Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN akan digunakan untuk:
 - menghasilkan analisis administrasi negara dan manajemen ASN;
 - Kemudian yang kedua adalah pembinaan jabatan fungsional administrasi negara; serta
 - Yang ketiga adalah kebijakan dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN yang terdiri dari:
 - Kebijakan-kebijakan pengembangan kompetensi ASN;
 - Peningkatan kapasitas aparatur negara;
 - Akreditasi lembaga-lembaga pelatihan; serta
 - ASN *Talent Academy*; dan
 - Evaluasi pada dampak penyelenggaraan pengembangan kompetensi.
3. Serta, penyelenggaraan pendidikan terapan.

**Pimpinan, dan
Anggota Komisi II yang terhormat,**

Perkenankan kami dalam kesempatan yang sangat baik ini, kami juga menyampaikan kembali harapan untuk mendapatkan tambahan anggaran tahun 2024, 2000 maaf, 2025.

LAN telah menyampaikan usulan penambahan anggaran dalam pertemuan tiga pihak dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk peruntukan sebagai berikut:

1. Yang pertama, teknologi informasi pembelajaran. Ini untuk mendukung transfer percepatan transformasi digital;
2. Yang kedua, pengembangan kompetensi ASN terutama penguatan-penguatan untuk jabatan fungsional binaan Lembaga Administrasi Negara;
3. Yang ketiga, untuk sarana dan prasarana pembelajaran yang diperuntukkan untuk renovasi rehabilitasi gedung pembelajaran-pembelajaran yang ada di Puslatbang Politek STIA dan yang ada di Jakarta.

Dari pagu anggaran yang tersedia, LAN belum dapat mengalokasikan anggaran yang memadai untuk memenuhi kebutuhan di atas sehingga pada

kesempatan yang baik ini, LAN mengajukan usulan tambahan anggaran tahun 2025 dengan total sebesar Rp121.880.230.253,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Untuk pengembangan teknologi informasi pembelajaran ASN sebesar Rp13.537.850.000,00;
- Yang kedua, peningkatan pengembangan kompetensi ASN sebesar Rp1.140.000.000,00 rupiah; dan
- Yang ketiga, sarana, peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran sebesar Rp107.290.380.253,00.

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang terhormat,

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan pada Rapat Dengar Pendapat yang baik ini. Menjadi harapan kami untuk terus mendapatkan dukungan terutama dari DPR sebagai mitra kerja dalam hal penajaman anggaran legislasi dan pengawasan sehingga Lembaga Administrasi Negara dapat memberikan kontribusi yang lebih maksimal bagi pembangunan nasional.

Atas perkenan, perhatian, dan kerja sama yang baik dari Pimpinan dan Anggota Komisi II yang terhormat, kami ucapkan banyak terima kasih.

Billahi taufiq wal hidayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.SI., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. NASDEM):

Terima kasih, Saudara Kepala LAN.

Berikutnya pada Saudara Ketua ORI, silakan.

KETUA OMBUDSMAN RI (MOKHAMMAD NAJIH, S.H., M.Hum., Ph.D.):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam Sejahtera untuk kita semua,

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi II DPR RI,
Yang saya hormati seluruh Anggota Komisi II DPR RI,
Yang saya hormati Kepala Lembaga Administrasi Negara beserta jajaran,
Yang saya hormati Kepala Arsip Nasional beserta jajaran, dan
Para Hadirin yang berbahagia,**

Mengawali kegiatan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Taala* atas segala karunianya kita dapat memenuhi undangan Komisi II DPR dalam rangka Rapat Dengar Pendapat untuk membahas Pendahuluan RAPBN Tahun 2025, Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2025, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024.

Pimpinan rapat yang saya hormati,

Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan beberapa laporan yang sesuai dengan objek pembicaraan atau topik pembicaraan di dalam Rapat Dengar Pendapat ini.

Yang pertama, berkaitan dengan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023. Bahwa perlu kami sampaikan Pagu Alokasi Anggaran Ombudsman Tahun 2023 adalah sebesar Rp248.327.920.000,00. Namun, setelah ada kebijakan *automatic adjustment*, pagu anggaran menjadi Rp239.573.649.000,00. Kemudian, selama tahun 2023, Ombudsman berhasil melaksanakan penyerapan anggaran seban, sebesar Rp227.552.664.570,00 atau dalam persentase sebesar 94,98%.

Pada tahun 2023, Ombudsman RI telah melakukan berbagai capaian kinerja. Yang pertama adalah penyelesaian laporan masyarakat bahwa Ombudsman telah menerima 26.461 laporan masyarakat yang terdiri dari:

- 7.392 laporan masyarakat tentang maladministrasi; kemudian
- Konsultasi *non*-laporan sebanyak 15.348 konsultasi;
- Respon Cepat sebanyak 948 laporan;
- Investigasi Atas Prakarsa Sendiri sebanyak 118 laporan; serta
- Respon terhadap tembusan surat sebanyak 2.666, 2.655 tembusan.

Untuk peningkatan akses pengaduan pada pelayanan publik, penerimaan pengaduan tersebut telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dan di dalam kegiatan peningkatan akses pengaduan pelayanan publik yang didukung oleh mitra Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya Komisi II, bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut telah dilakukan di sebanyak 52 titik atau kabupaten/kota di 20 provinsi.

Kegiatan ini ditujukan untuk mensosialisasikan peran dan fungsi Ombudsman serta mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat tentang penyelenggaraan pelayanan publik.

Kegiatan tersebut juga telah memberikan sosialisasi tentang eksistensi Ombudsman dan juga mekanisme pelaporan kepada Ombudsman Republik Indonesia, baik itu di pusat maupun di daerah.

Berkaitan dengan penyelesaian laporan, Ombudsman Republik Indonesia telah menyelesaikan laporan masyarakat sebanyak 7.909 laporan masyarakat atau pengaduan yang terdiri dari 1.200 laporan diselesaikan di tingkat pusat dan 737 laporan dicapai, diselesaikan di tingkat perwakilan.

Dari 7.999 capaian di tingkat pusat adalah mencapai target atau melampaui target sebesar 162,82%. Sedangkan untuk capaian di tingkat perwakilan 75,09%. Sedangkan capaian yang belum termasuk dilaporkan

secara sebagai bentuk capaian kelembagaan adalah 15.348 yang berupa konsultasi *non-laporan*.

Kemudian, terkait dengan saran sebagai salah satu tugas fungsi Ombudsman terkait dengan peningkatan pelayanan publik. Ombudsman telah memberikan saran sebanyak 46 analisis kebijakan yang keseluruhannya telah dilaksanakan.

Kemudian terhadap Upaya Pencegahan Maladministrasi, Ombudsman telah, sejak tahun 2014 telah melakukan survei kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di mana hasil penilaian kepatuhan di tahun 2023 terhadap kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah sebanyak 586 entitas secara nasional menunjukkan peningkatan yang sangat baik.

Jumlah kementerian, lembaga, dan daerah yang berada di zona hijau meningkat dari, sebesar 46,42%. Jika dilihat dari tahun 2022 menjadi sebesar 70,70% di tahun 2023 yang diikuti dengan penurunan zona kuning dan zona merah yang masing-masing dari 42,66% menjadi 22,66%. Dan zona merah dari 10,92% di tahun 2023 menjadi 6,64% di tahun 2023.

Terkait dengan Penjaminan Mutu, untuk memastikan sistem dan proses prosedur dan peningkatan sumber daya sesuai dengan standar harapan dan rencana yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik bahwa Ombudsman telah memastikan tujuan dapat dicapai dengan baik dan konsisten di mana dalam Manajemen Mutu Terpadu sudah dapat diselesaikan 86 pengaduan masyarakat atau 95,55% dari 90 pengaduan di tahun 2023.

Untuk Dukungan Manajemen, capaian yang diperoleh Ombudsman Republik Indonesia antara lain:

- Penghargaan terhadap Kearsipan Ombudsman RI memperoleh predikat A "Memuaskan" dari ANRI; kemudian
- Keterbukaan Informasi Publik meraih peringkat tertinggi 94,37 dengan predikat "Informatif;" dan
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Award dengan nilai 95,
- Indeks maturitas mencapai level 3 dengan nilai 3,007; dan
- Indeks sistem merit memperoleh kategori "Sangat Baik" dengan nilai 3,342,5;
- Opini BPK dengan predikat "WTP" selama tujuh tahun berturut-turut sejak tahun 2016;
- Digital Government Award SPBE Summit dengan nilai 3,75 "Sangat Baik;" dan
- Nilai reformasi birokrasi yang meningkat dari 73,31 menjadi 77,62.

Demikian untuk Pencapaian Evaluasi Tahun 2023.

Sedangkan untuk Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024, Ombudsman Republik Indonesia menerima pagu sebesar Rp248.841.107.000,00. Namun, terdapat, setelah dilakukan *automatic adjustment*, berkurang atau menjadi Rp206.183.560.000,00.

Realisasi anggaran sampai dengan 31 Mei sebesar Rp80.131.654.214,00 atau sebesar 38,86%. Dan realisasi anggaran sampai 10 Juni kami laporkan sebanyak 46,72%.

Capaian kinerja untuk Penerimaan dan Penyelesaian Laporan sampai dengan 31 Mei 2024 bahwa Ombudsman telah menerima pengaduan terhadap dugaan maladministrasi sebanyak 4.512 laporan yang terdiri dari:

- Laporan Masyarakat sebanyak 3.642 laporan; dan
- Respon Cepat Ombudsman atau RCO sebanyak 835 laporan; dan
- Investigasi Atas Prakarsa Sendiri sebanyak 35 prakarsa.

Berdasarkan sebaran laporan, tiga penerimaan laporan terbanyak, yaitu:

- Ombudsman Pusat sebanyak 432 laporan;
- Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan 282 laporan;
- Ombudsman Perwakilan Jambi 256 laporan;

Laporan masyarakat yang diterima oleh Ombudsman diklasifikasikan ke dalam beragam substansi seperti mengenai kepegawaian, agraria, serta perhubungan dan infrastruktur menjadi tiga substansi terlapor tertinggi.

Terlapor merupakan penyelenggara negara dan Pemerintah yang dianggap melakukan dugaan maladministrasi yang dilaporkan kepada Ombudsman dengan jumlah terlapor terbanyak adalah pemerintahan daerah.

Terhadap Penyelesaian Laporan dan Pengaduan Masyarakat pada tahun 2024, yang sudah diterima diselesaikan adalah sebanyak 3.127 laporan dari target 9.672 di tahun 2024 atau sebesar 32,33%. Dan yang sedang dalam proses penyelesaian sebanyak 1.385 laporan masyarakat.

Seluruh proses penyelesaian laporan Ombudsman Republik Indonesia bermuara pada temuan praktik dugaan maladministrasi pada layanan, penyelenggaraan layanan masyarakat yang dilaporkan oleh publik. Dugaan maladministrasi yang berhasil diidentifikasi pada laporan yang memasuki tahap investigasi atau pemeriksaan adanya dugaan maladministrasi yang ditemukan oleh Ombudsman dapat dilihat pada paparan sebagai berikut.

Sebagaimana di dalam *slide*, kegiatan yang sedang dan masih dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2024 nanti bahwa ada kurang lebih enam yang masih sedang dalam proses, yaitu:

1. Akses Pengaduan Pelayanan Publik; kemudian
2. Sarana Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik; kemudian
3. Pendampingan dalam rangka optima, optimalisasi SP4N Lapor terkait dengan *external complaint handling*; kemudian
4. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bagi Kelompok Marginal Dan Bagi Masyarakat Daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal yang dilakukan pendampingan; serta
5. Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik oleh kementerian, lembaga, dan daerah terhadap Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang akan diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Kemudian, terkait dengan anggaran tahun 2024, perlu kami laporkan bahwa kepada Pimpinan Komisi II beserta Anggota Komisi II bahwa Ombudsman memerlukan usulan tambahan berkaitan dengan anggaran tahun 2024. Mengingat bahwa terjadi peristiwa darurat pada tanggal 13 Mei di mana gedung kami yang usia sudah di atas 50 tahun bahwa trafo listrik mengalami kerusakan sehingga pada saat ini kami masih meminjam PLN berupa trafo yang guna kelancaran listrik di kantor Ombudsman. Mengingat kebutuhan yang mendesak, maka kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2.000.500.000,00.

Berkenaan dengan kerusakan trafo juga, kami belum memiliki generator sehingga kami juga mengusulkan adanya alokasi anggaran untuk pembelian generator sebanyak Rp5.000.000.000,00.

Termasuk juga untuk perbaikan lift gedung yang berusia sudah 37 tahun, Ombudsman mengusulkan usulan penambahan anggaran untuk perbaikan lift sebanyak Rp4.800.000.000,00.

Berkaitan dengan sarana prasarana Ombudsman, gedung Ombudsman yang ditempati sekarang itu telah berusia kurang lebih 37 tahun, sementara penambahan pegawai dan kegiatan semakin banyak sehingga perlu juga dukungan untuk penambahan sarana gedung yang lebih baik.

Rencana Kegiatan Ombudsman RI tahun 2025. Rencana Kerja Ombudsman Tahun 2025 disusun dengan berpedoman kepada RKP Tahun 2025 di mana pada RKP tersebut Ombudsman RI mendukung Prioritas Nasional ke-7 yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Program Prioritas Reformasi Tata Kelola Pemerintahan khususnya pada kegiatan Prioritas Penguatan Manajemen Kinerja Pembangunan, indikator keberhasilan kegiatan prioritas ini dapat diukur salah satunya melalui persentase kementerian, lembaga, dan daerah yang mendapatkan opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik kualitas tertinggi.

Pada Rencana Kerja Ombudsman Tahun 2025 terdapat enam rincian *output* prioritas nasional, yaitu:

- Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kementerian dan Lembaga; dan
- Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah. Opini pengawasan, ini merupakan program pengganti dari survei kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik terhadap standar penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana periode sebelumnya; kemudian
- Yang ketiga adalah Laporan atau Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan di kantor pusat; dan

- Penyelesaian Laporan yang diselesaikan di perwakilan; dan
- Yang kelima adalah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri di tingkat pusat; dan
- Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri di tingkat daerah atau Perwakilan.

Pagu Indikatif Tahun 2025 adalah sebesar Rp232.211.019.000,00.

Terdiri dari:

- Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebesar Rp44.882.000.000,00; dan
- Program Dukungan Manajemen sebesar Rp187.329.019.000,00 dengan rincian:
 - Belanja operasional sebesar Rp187.329.019.000,00; dan
 - Belanja non operasional masih sebesar 0%, 0 rupiah atau belum teralokasi.

Pada Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, alokasi pagu indikatif per-kegiatan telah dialokasikan. Namun, pada Program Dukungan Manajemen, pagu indikatif kegiatan hanya beralokasi untuk belanja pegawai, perlengkapan, dan kerumahtanggaan atau belanja operasional.

Sedangkan belanja non operasional yang dibutuhkan untuk dukungan kegiatan di Kesekjenan dan 34 Perwakilan belum, belum teralokasi. Sedangkan kegiatan yang belum teralokasi di antaranya adalah:

- Perencanaan dan Keuangan;
- Fasilitasi Pelayanan Teknis Pengawasan Pelayanan Publik;
- Kehumasan dan Digitalisasi Data; dan
- Teknologi Informasi;
- Pengawasan Internal;
- Hukum, Kerja Sama, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi.

Pagu Indikatif Tahun 2025 lebih rendah daripada Pagu Indikatif Tahun 2024. Walaupun pada Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik terjadi penyesuaian target prioritas nasional. Namun, pada Program Dukungan Manajemen mengalami penurunan signifikan lebih rendah dari Pagu Tahun 2024.

Pagu indikatif operasional Program Dukungan Manajemen sebesar Rp187.329.019.000,00 lebih rendah dibanding tahun 2024 sebesar Rp198.085.012.000,00. Sebagai informasi bahwa penurunan tersebut pada gaji pegawai dan pemeliharaan sarana prasarana pusat dan perwakilan dan Pagu non operasional program dukungan manajemen tidak teralokasikan pada Pagu Indikatif Tahun 2025.

Kebutuhan anggaran Ombudsman tahun 2025 adalah Rp433.939.234.000,00. Sementara besaran pagu indikatif adalah Rp232.211.019.000,00. Selisih jumlah kebutuhan dengan Pagu indikatif kami usulkan sebagai tambahan anggaran yaitu sebesar Rp201.728.215.000,00.

Oleh karena itu, izinkan kami Ombudsman Republik Indonesia mohon dukungan dari seluruh Pimpinan Komisi II serta Anggota Komisi II DPR RI dalam penganggaran tahun 2025 tersebut.

Usulan tambahan anggaran Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik untuk:

1. Pelaksanaan Kegiatan Akses Pengaduan Pelayanan Publik bersama mitra yang kita usulkan sebanyak 150 lokasi;
2. Penambahan target pada Kegiatan Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Pusat; dan
3. Investigasi Atas Prakarsa Sendiri atau IAPS Ombudsman pada Penyelenggaraan Pelayanan Publik; juga
4. Digunakan untuk kegiatan baru di dalam peningkatan kualitas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terhadap Badan Usaha Milik Negara yang ini belum pernah dilakukan yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan BUMN; serta
5. Predikat Penilaian Mutu Pengawasan Pelayanan Publik di Lingkungan Ombudsman sebagai lompatan upaya dan strategi untuk mengakselerasi capaian hasil sistem manajemen mutu terpadu di Ombudsman.

Kemudian selain itu, juga usulan tambahan anggaran pada Program Dukungan Manajemen:

1. Sebanyak Rp55.327.864.000,00 yang digunakan untuk memenuhi gaji pegawai; dan
2. 500, eh maaf, Rp59.268.289.000,00 digunakan untuk sarana dan prasarana serta pengembangan kompetensi pegawai di pusat maupun di 4, 34 perwakilan, termasuk rencana menambah perwakilan di provinsi yang baru; sedangkan
3. Anggaran tambahan lainnya dialokasikan untuk kegiatan dukungan yang di Kesekjenan yang saat ini masih belum ada anggaran atau 0 rupiah.

Demikian yang bisa kami laporkan pada Pimpinan Komisi II DPR beserta Anggota Komisi II DPR RI yang terhormat. Kiranya mohon saran, dukungan, dan atensi.

Dan besar harapan kami agar usulan tambahan anggaran dapat dipenuhi. Secara khusus, *urgensi* atas pengadaan trafo daya, dan generator, serta lift, mungkin mohon dipertimbangkan.

Atas perhatian dan perkenan Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Sejahtera untuk kita semua.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.SI., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. NASDEM):

Terima kasih, Kepala, Ketua ORI.

Saya perpanjang dulu 30 menit, *nih*.

Berikutnya kami persilakan, Kepala ANRI.

SEKRETARIS UTAMA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (RINI AGUSTIANI, S.H., M.A.P.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi, dan

Salam sehat sejahtera untuk kita semuanya, dan

Salam arsip,

Yang terhormat Bapak Pimpinan, dan

Anggota Komisi II DPR RI,

Yang saya hormati Bapak Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia beserta jajaran,

Bapak Ketua Ombudsman Republik Indonesia beserta jajaran,

Dan sebelumnya, kami sampaikan permohonan izin dari Bapak Plt. Kepala Arsip Nasional yang tidak dapat hadir dikarenakan bersamaan dengan kegiatan Konferensi Internasional Arsip Audiovisual atau SIAPAVA ke-28 yang tahun ini sebagai penyelenggara adalah Indonesia.

Sebagai komunitas kearsipan dan atas nama lembaga, kami menyampaikan terima kasih atas undangan rapat hari ini serta dukungan dari Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II DPR RI selama ini terhadap Arsip Nasional Republik Indonesia sehingga ANRI dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menjalankan arsip sebagai simpul pemersatu bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bapak/Ibu Anggota Dewan yang kami hormati,

Pada kesempatan rapat kerja kali ini, izinkan kami menyampaikan tiga pembahasan, yaitu:

1. Yang pertama, Rencana Kerja Program dan Anggaran ANRI Tahun Anggaran 2025;
2. Yang kedua, Capaian Kinerja Kearsipan ANRI Tahun 2023; serta
3. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran ANRI Tahun 2024.

Pembahasan yang pertama tentang Rencana Kerja Program Dan Anggaran ANRI Tahun 2025. Berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta Menteri Keuangan Republik Indonesia bahwa ANRI mendapatkan pagu sebesar Rp251.995.636.000,00.

Jika dibandingkan dengan Pagu Indikatif ANRI Tahun Anggaran 2024, terjadi penurunan pagu sebesar Rp27.732.209.000,00 atau sebesar 9,9%.

Bapak/Ibu Anggota Dewan yang kami hormati,

Berdasarkan alokasi anggaran pada Pagu Indikatif ANRI Tahun 2025 sebesar Rp251.995.636.000,00 ANRI mengalokasikan untuk mendukung dua program yaitu:

- Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional sebesar Rp46.544.853.000,00 atau 18%; serta
- Program Dukungan Manajemen sebesar Rp205.450.783.000,00 atau 82% dari total Pagu Indikatif ANRI Tahun 2025.

Berdasarkan jenis belanja, ANRI mengalokasikan untuk:

- Belanja Operasional sebesar Rp179.765.185.000,00 atau 71%; serta
- Belanja Non Operasional sisanya yaitu sebesar Rp72.230.451.000,00 atau 29%.

Berdasarkan Program Prioritas, ANRI mengalokasikan sebesar 3% dari total pagu indikatif atau sebesar Rp8.383.694.000,00. Alokasi anggaran tersebut untuk mendukung kegiatan prioritas yaitu Kegiatan Informasi Arsip yang tersedia di JIKN. Arsip yang ditetapkan sebai, sebagai memori kolektif bangsa serta kegiatan arsip terjaga dan arsip statis yang digitila, digitalisasi.

Kemudian berdasarkan sumber pendanaan, dari rupiah murni sebesar Rp236.251.933.000,00 atau 94%; serta sumber pendanaan PNBB, PNBPN sebesar Rp15.743.703.000,00 atau 6%.

Bapak/Ibu Anggota Dewan yang kami hormati,

Memperhatikan postur anggaran ANRI sesuai Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024, ANRI mengusulkan usulan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sebagai upaya peningkatan pelestarian arsip sebagai memori kolektif bangsa, meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang Arsip dan sejarah kebangsaan, menguatkan identitas dan jati diri bangsa, serta dalam rangka pemajuan kebudayaan yang bermuara pada peradaban bangsa.

Tambahan anggaran juga diperlukan untuk perluasan layanan arsip kepada publik melalui pusat-pusat pembelajaran pengetahuan memori bangsa Indonesia, meningkatkan rasa kesatuan dan persatuan masyarakat Indonesia khususnya di wilayah perbatasan negara, serta menguatkan peran arsip sebagai bahan diplomasi pertahanan dan diplomasi internasional.

Dalam rangka memperkuat kinerja dan layanan kearsipan nasional tersebut, ANRI mengusulkan Anggaran Biaya Tambahan sebesar Rp239.366.284.000,00. Usulan ABT tersebut kami alokasikan untuk:

- Yang pertama, Pengokohan Ketahanan Budaya Nasional Melalui Penyelamatan Arsip Kemaritimian sebesar Rp21.123.080.000,00.

Peran serta ANRI dalam memulihkan serta memperkuat identitas dan jati diri bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan pengokohan ketahanan budaya nasional. Kegiatan ini dilakukan untuk mewujudkan pusat-pusat pembelasa, pusat-pusat pembelajaran, ingatan, deposit pengetahuan Indonesia sebagai poros maritim dunia, serta menguatkan peran arsip sebagai bahan diplomasi negara dalam pertahanan negara maupun berbagai diplomasi internasional;

- Yang kedua, Arsip Wilayah Papua Yang Digitalisasi sebesar Rp10.000.000.000,00. Dalam rangka pengembangan narasi komprehensif tentang terapi memori kolektif bangsa, khususnya Papua, melalui digitalisasi arsip yang bertujuan meningkatkan etos dan cara kerja, pola pikir, *mindset*, dan karakter untuk melakukan percepatan pembangunan terutama di Papua. Dukungan dan partisipasi, partisipasi ANRI sebagai upaya untuk mengharmonisasikan keberhasilan pembangunan fisik, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain dengan melakukan pembangunan terhadap manusia Papua itu sendiri agar memiliki memori, semangat, perspektif, dan paradigma kebangsaan Indonesia;
- Yang ketiga, Layanan Preservasi Arsip Kepada Masyarakat sebesar Rp21.000.000.000,00 untuk memberikan layanan preservasi arsip secara lebih proaktif dengan mengundang masyarakat, perwakilan warga sampai dengan tingkat RT untuk diberikan layanan dan pemahaman preservasi arsip keluarga. Kegiatan ini sekaligus sosialisasi kepada masyarakat di seluruh Indonesia bahwa lembaga kearsipan memberikan layanan berupa restorasi arsip keluarga beserta layanan preservasi arsip lainnya;
- ABT yang keempat, Percepatan Pelayanan Arsip Pemilihan Umum sebesar Rp5.706.467.000,00. Peristiwa Pemilu menghasilkan arsip yang merekam aktivitas demokrasi bangsa Indonesia dengan arsip yang tersebar dan tercipta dari berbagai pencipta arsip. Tambahan anggaran diperlukan untuk menelusuri, menilai, memverifikasi, dan menyelamatkan berbagai jenis arsip Pemilu. Penyelamatan arsip Pemilu bertujuan untuk memelihara memori dan mengembangkan pengetahuan masyarakat tentang aktivitas demokrasi di Indonesia;
- Yang kelima, Revitalisasi Sarana dan Prasarana Preservasi Arsip sebesar Rp61.219.587.000,00. Pembaharuan sarana dan prasarana preservasi arsip untuk meningkatkan kinerja restorasi arsip, penyimpanan arsip, digitalisasi arsip, dan pengujian arsip. Sarana dan prasarana ditingkatkan selain untuk perlindungan dan pelestarian arsip sebagai memori kolektif bangsa, juga untuk peningkatan digitalisasi arsip sebagai akselerasi layanan arsip kepada masyarakat melalui akses digital; dan
- Yang keenam adalah Pusat Khasanah Arsip Nusantara sebesar Rp120.317.150.000,00 untuk mendekatkan bidang kearsipan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kebermanfaatan arsip bagi masyarakat. Usulan tambahan anggaran terdiri dari pembangunan pusat khasanah arsip di provinsi Riau sebagai tindak lanjut hibah barang milik daerah antara Pemerintah Provinsi Riau dengan ANRI serta revitalisasi diorama perjalanan bangsa, ruang

layanan arsip statis di Jakarta sebagai upaya ANRI untuk mewujudkan pelayanan lebih berkualitas dan prima melalui berbagai kegiatan publik yang dapat menyentuh langsung kepada masyarakat.

Kami mohon kepada Bapak Pimpinan sidang beserta Bapak/Ibu Anggota Dewan yang kami hormati, agar usulan tambahan anggaran kami dapat dipertimbangkan untuk dipenuhi.

Pembahasan yang kedua, Bapak/Ibu Anggota Dewan yang kami hormati,

Pada kesempatan ini, kami juga menyampaikan Capaian Kinerja Kearsipan Tahun Anggaran 2023. Kinerja Kearsipan Nasional Tahun 2023 tergambar dalam tiga kelompok program kearsipan yaitu Tertib Arsip, Transformasi Digital Kearsipan, dan Memori Kolektif Bangsa.

Capaian kinerja kearsipan tergambar dalam empat indikator kinerja utama, yaitu:

1. Indeks Kepatuhan Terhadap Kebijakan Kearsipan;
2. Yang kedua, Indeks Ketersediaan Arsip; dan
3. Yang ketiga, Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan; dan
4. Yang empat, Indeks Reformasi Birokrasi.

Semuanya telah tercapai dengan hasil baik dengan skor 80,24 dari target tahun 2023 sebesar 73,26 atau tercapai 109,52%.

Komitmen untuk menegakkan dan melaksanakan gerakan Tertib Arsip secara nasional terus semakin berkualitas. Tertib Arsip di segala lini dan jajaran terus mengalami peningkatan:

1. Kementerian/lembaga telah mencapai 94,19% berkinerja minimal "Baik" atau "AA" untuk 34 kementerian/lembaga;
2. Provinsi mencapai 82,35%. Ini terjadi kenaikan 20% dari tahun 2022, yaitu yang "AA" sudah 6 provinsi;
3. Namun, kabupaten/kota baru mencapai 35,43%. Yang "AA" yang "Baik" atau yang baru "Sangat Memuaskan" 12 kabupaten/kota.

Pencapaian untuk kinerja Tertib Arsip seperti di atas belumlah terlalu menggembirakan khususnya di daerah kabupaten/kota. Sebagian besar kabupaten/kota tidak memiliki arsip statis. Sumber-sumber arsip ya, sumber-sumber arsip yang merekam peristiwa dan sejarah masa lalu.

Pada tahun 2023, ANRI memiliki program prioritas dalam rangka pendampingan penataan dan digitasi arsip pada 63 kementerian/lembaga yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Penataan arsip ini diharapkan menjadi percepatan untuk menciptakan pengelolaan arsip yang tertib dan dikelola secara elektronik sehingga apabila nanti lembaga negara sudah pindah ke IKN, maka arsip tersebut dapat diakses secara digital tanpa harus membawa fisik arsipnya.

Dengan demikian, ketersediaan arsip yang autentik utuh dan terpercaya yang dapat diakses secara digital dapat berkontribusi untuk menjaga keberlanjutan penyelenggaraan pemerintah dan menjaga penyampaian Informasi untuk kelangsungan peradaban bangsa.

Digitasi Arsip Kertas K/L yang akan pindah ke IKN pada tahun 2023 telah berhasil mendigitisasi lebih dari 35 ribu meter lari dari 63 K/L serta telah ditata lebih dari 1,2 juta arsip didigitalkan. Hal ini akan sangat bermanfaat baik secara ekonomi maupun untuk penyelamatan arsip itu sendiri di masa depan.

Percepatan pelaksanaan digitalisasi kearsipan dilaksanakan melalui tiga strategi pokok yaitu implementasi Srikandi, SIKN, JIKN, dan digitalisasi arsip lama.

Implementasi Srikandi sampai dengan Mei tahun 2024 mencapai 694 kementerian/lembaga/daerah yang telah memiliki akun, akun *live* atau 100% dari 694 K/L. Mengingat sangat pesat dari tahun 2022 yang baru mencapai 19 K/L sehingga jumlah pengguna aplikasi Srikandi ini sudah mencapai 3.511.655 orang dengan jumlah naskah dinas sebanyak 67.269.542.070 arsip.

Bapak/Ibu Anggota Dewan yang kami hormati,

Jaringan Informasi Kearsipan Nasional atau JIKN yang merupakan sistem jaringan informasi dan portal layanan kearsipan secara nasional memiliki peran penting dalam konteks negara kesatuan yaitu sebagai instrumen penyatuan riwayat dokumenter yang terpisah-pisah atau terpecah-pecah di antara para penyelenggara kearsipan seluruh Indonesia.

Pada tahun 2023, JIKN telah memiliki anggota sebanyak 445 simpul jaringan, naik 105 dari tahun 2002 sebanyak 340 simpul jaringan. Total kunjungan dan layanan melalui JIKN mencapai 7.078.797 kali.

Arsip sebagai memori kolektif bangsa diselamatkan melalui empat cara yaitu akuisisi, penarikan, *oral history* atau sejarah lisan, repatriasi dan registrasi memori kolektif bangsa.

Akuisisi dilakukan oleh semua lembaga kearsipan sesuai jenjang kewenangannya, demikian juga wawancara sejarah lisan atau *oral history*. Sedangkan repatriasi dilakukan oleh ANRI untuk menarik arsip dari negara bekas penjajah yaitu Belanda, Inggris, Jepang. Saat ini sedang proses repatriasi arsip kolonial Belanda.

Yang selanjutnya adalah registrasi MKB yang secara berjenjang akan menjadi *Memory of the World* tingkat Asia Pasifik atau *Memory of the World International* sesuai dengan jenjang nilai signifikansinya.

Pada tahun 2023, ANRI telah menyelamatkan arsip tentang COVID-19 sebanyak 27.107 arsip. Arsip kemaritiman sebanyak 232 arsip, serta arsip terjaga dan arsip statis sebanyak 35.431 arsip.

Permasalahan penyelamatan dan pelestarian arsip di daerah menjadi tantangan yang paling berat karena keterbatasan anggaran kearsipan yang tidak bergerak naik dari angka di tahun-tahun sebelumnya. Bahkan di beberapa daerah cenderung turun.

Sarana dan prasarana yang sangat terbatas, SJM yang minimalis selalu terombang-ambing oleh dinamika politik daerah yang pekat, pergantian kepala dinas yang cepat, dan berbagai keterbatasan serta problematik lainnya.

Sebagian besar daerah masih mengalami darurat arsip statis, darurat arsip bersejarah karena sebagian besar yang disimpan hanya arsip kepegawaian dan keuangan.

Bapak/Ibu Anggota Dewan yang kami hormati,

Semua arsip yang diselamatkan dan dilestarikan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk dilayankan kepada masyarakat. Kecuali layanan kearsipan yang dilakukan melalui SIKN, JIKN. Maka terdapat layanan digital melalui situs sejarah nusantara anri.go.id untuk layanan arsip VOC dan Hindia Belanda. Jumlah pengguna layanan arsip statis secara nasional pada tahun 2023 mencapai sebanyak 464.108 pengguna.

Selanjutnya, Program Registrasi Memori Kolektif Bangsa dan *Memory of the World* berjalan cukup menggembirakan. ANRI sebagai markas komite nasional MOW Indonesia mendapat kepercayaan penuh dari *stakeholder* dalam dan luar negeri. Berbagai kalangan di daerah komunitas perseorangan sangat antusias mendukung program ini.

Hingga Mei tahun 2024, kekayaan arsip dan naskah Indonesia yang telah diakui dunia adalah sepuluh arsip untuk *Memory of the World* dan lima arsip untuk *memory*, MOWCAP atau Asia Pasifik.

Pada tanggal 8 Mei 2024 bertempat di Ulan Bator, Mongolia, MOWCAP menetapkan tiga warisan dokumenter Indonesia dalam register regional memori Asia Pasifik 2023-2024. Ketiga warisan dokumen tersebut adalah:

1. Arsip Indarung, pertama, Semen Padang sebagai pabrik semen pertama di Asia Tenggara yang di, yang diajukan oleh PT Semen Padang;
2. Arsip tentang, yang kedua, arsip tentang pusat penelitian perkebunan gula Indonesia tahun 1887 sampai 1986 yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta pusat penelitian perkebunan gula Indonesia; dan
3. Yang ketiga, Manuskrip Tambo Tuanku Imam Bonjol yang diusulkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Penetapan ini mengukuhkan kembali bahwa Indonesia mampu melestarikan dan meningkatkan akses terhadap warisan dokumenter yang memiliki signifikan regional di Asia dan Pasifik.

Sedangkan untuk MKB pada Tahun 2022 sebanyak 5 Khasanah, tahun 2023 terdapat sebanyak 12 khasanah, dan kemudian pada bulan Mei 2024 telah ditetapkan 7 warisan dokumenter sebagai memori kolektif bangsa.

Bapak/Ibu Anggota Dewan yang kami hormati,

Sesuai dengan Daftar Isian, DIPA ANRI pada tahun 2003, ANRI mendapat alokasi sebesar Rp267.670.167.000,00 untuk anggaran dalam mendukung dua program, yaitu:

- Program Penyelenggaraan Kearsipan; dan
- Dukungan Manajemen.

Dan serta berdasarkan jenis belanja, ANRI mengalokasikan untuk:

- Belanja pegawai sebesar Rp107.075.311.000,00;
- Belanja barang;
- Belanja modal; dan lain-lainnya sebagaimana dalam layar.

Tahun Anggaran 2023, anggaran yang terserap di ANRI sebesar Rp264.771.351.000,00 atau 98,92%.

Realisasi kegiatan prioritas ANRI tahun 2023 baik capaian anggaran maupun capaian *output* rata-rata mencapai lebih dari 96%.

Terdapat satu kegiatan yang tidak tercapai target, yaitu pada instansi pemerintah yang menerima pendampingan penataan arsip, persiapan pemindahan IKN. Target semula adalah atas 70 K/L namun tercapai 63 K/L. Terdapat 7 K/L yang tidak bersedia dilakukan pendampingan penataan arsip dengan beberapa pertimbangan misalnya kerahasiaan arsip serta telah memiliki pendanaan tersendiri, yaitu:

1. Mahkamah Konstitusi;
2. Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kementerian Sekretariat Negara;
4. Kementerian ESDM;
5. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
6. Kementerian Hukum dan HAM; serta
7. Paspampres.

Bapak/Ibu Anggota yang kami hormati,

Agenda yang ketiga, yaitu Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024. Sesuai dengan Surat Pagu Anggaran ANRI mendapatkan anggaran sebesar Rp279.727.665.000,00.

Kemudian, ANRI mendapatkan tambahan anggaran untuk kenaikan gaji 8%, 8%, sehingga total anggaran yang diperoleh ANRI tahun 2024 adalah 280, Rp282.425.872.000,00.

Kemudian, berdasarkan Surat Menteri Keuangan perihal *Automatic Adjustment*, ANRI terkena AA sebesar Rp21.326.874.000,00. Sehingga total Pagu ANRI Tahun 2004 yang dapat dikelola sebesar Rp261.098.998.000,00.

Anggaran ANRI Tahun 2024 dialokasikan untuk mendukung Program Penyelenggaraan Kearsipan, Dukungan Manajemen, dan Belanja Barang, serta Belanja Modal sebagaimana dalam layar. Selanjutnya,

Bapak/Ibu Anggota Dewan yang kami hormati,

Kami laporkan sampai dengan periode 10 Juni 2024, realisasi anggaran ANRI telah terserap sebesar Rp135.276.070.253,00 atau 47,90% dari Pagu Anggaran ANRI Tahun 2024. Namun, apabila dihitung dari pagu yang dapat dikelola ANRI setelah dipotong *automatic adjustment*, maka kami sudah melakukan realisasi sejumlah 51,81%.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II yang saya muliakan berkenan untuk terus mendukung upaya pembangunan kearsipan untuk menjamin akuntabilitas kinerja pemerintahan dan melestarikan memori dan identitas sebagai marwah bangsa kita Indonesia tercinta.

Terima kasih dan mohon maaf apabila terhadap terdapat sikap dan tutur kata yang tidak berkenan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. NASDEM):

Terima kasih.

Bapak/Ibu Anggota Komisi II DPR RI,

Kita sudah mendengarkan ya, penjelasan dari Kepala LAN, Kepala ANRI, dan juga Ketua ORI. Untuk itu, kami akan mempersilakan kepada Bapak/Ibu Anggota Komisi II untuk melakukan pendalaman terhadap penjelasan.

Tapi saya ingin sampaikan, ini baru pagu indikatif, ya. Jadi, masih ada dua tahap nanti pembahasan. Jadi, saya mohon pada Bapak/Ibu untuk singkat, padat, dan jelas masukannya, Pak.

Pak Guspari, terus Pak Agung, Pak Difriadi, Pak Amin, dan Pak Kamran. Cukup lima, ya.

Silakan, Pak Guspari. Singkat, padat, dan jelas.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan, dan
Anggota Komisi II yang saya hormati,
Bapak/Ibu baik yang dari LAN, ANRI dan Ombudsman,
Hadirin dan Hadirat yang saya muliakan,**

Setelah saya membaca dan menyimak paparan yang Bapak/Ibu sampaikan, saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada LAN dan ANRI. Dari 11 yang sudah melakukan paparan kementerian dan lembaga terhadap Evaluasi Capaian dan Rencana Anggaran 2025, LAN adalah peringkat pertama, *the best*, dari 11 kementerian/lembaga yang sudah kita bahas. Capaiannya adalah 99,30. Tidak ada satu pun kementerian dan lembaga yang sudah, saya punya catatan saya catat, yang setinggi capaian LAN ini.

Yang nomor dua adalah ANRI capaiannya 98,92 hanya beberapa 0,% dari LAN. Namun, Ombudsman saya catat ranking 10 dari 11. Saya tentu memberikan keprihatinan dan saya selalu mengingatkan bagaimana mitra-mitra kami di Komisi II ini *the best*.

Kalah dengan, cuma dengan Bawaslu capaian anggarannya adalah 86,36, anggarannya 9,91 T. Sedangkan Ombudsman anggarannya cuma 239 miliar.

Nih, ini tentu menjadi catatan bagi Kepala LAN bagaimana kinerjanya ini selalu harus ditingkatkan dan juga saya tentu berharap kepada LAN dan ANRI begitu juga Ombudsman bagaimana ingin selalu bisa mempertahankan itu. Dan saya yakin dan percaya ini tentu akan mendapatkan catatan penting juga dari Menteri Keuangan, pasti ada bonus-bonus yang akan diberikan terhadap capaian yang dilakukan itu.

Yang kedua adalah, karena kata Ketua supaya lebih cepat saya berbaring saja, ketiga lembaga ini juga minta tambahan anggaran, tidak ada satu pun yang minta, yang tidak meminta tambahan. LAN meminta 121 miliar, sedangkan ANRI meminta 239 miliar, sedangkan Ombudsman meminta 201 miliar.

Saya konfirmasi betul, ya?

LAN Rp121.887.230.253,00. Pakai angka Rp3, *gimana* itu? Enggak, enggak pas lagi *nih*, kalimat yang semacam itu.

Yang kedua adalah saya lihat secara umum, kekurangan anggaran ini manakala dibandingkan dengan 2023 ataupun 2004 secara ketiga lembaga ini, malah yang memprihatinkan itu adalah ATR/BPN. Beliau meminta anggaran 14 T, yang diakomodir cuma 6,4 T. Bayangkan, saya katakan kemarin, anggaran ATR.BPN itu turun 20% dari tahun 2023.

Saya lihat LAN dan ANRI beserta Ombudsman saya kira, saya lihat rada-rada hampir sama jadi tidaklah begitu signifikan penurunan yang ditetapkan oleh Baleg bersama Menteri Keuangan dan Bappenas.

Tentu saya berharap tambahan anggaran ini saya, saya selalu katakan kepada kawan-kawan, mudah-mudahan tambahan anggaran yang diminta mudah-mudahan diapresiasi oleh kawan-kawan. Sebagaimana dikatakan itu kegunaan saya tidak perlu ungkapkan tadi juga sudah disampaikan bahwa tambahan anggaran di masing-masing lembaga yang melakukan RDP dengan Komisi II pada hari ini, jelas saya melihat adalah sesuatu yang sangat substantif yang diperlukan.

Apalagi Ombudsman ada persoalan-persoalan yang berkaitan tentang masalah keamanan, kenyamanan di kantor karena kata beliau tadi sudah 32 tahun kantor dimanfaatkan oleh, apa, apakah di kantor dimanfaatkan oleh Ombudsman atau kantor yang sudah 30 tahun keberadaannya, itu beda.

Ombudsman apakah memang sudah 32 tahun keberadaannya? Tentu tidak mungkin. *Nah*, itu saya pertanyakan, mungkin kantornya memang sudah 32 tahun, lalu Ombudsman berkantor di sana itu punya nilai yang berbeda.

Tentu hal-hal yang prinsip tadi apakah lift, apakah dan lain sebagainya, tentu menjadi sesuatu yang dicermati yang menurut hemat saya perlu kita perjuangkan.

Intinya adalah saya pribadi dan mudah-mudahan kawan-kawan terhadap capaian yang dilakukan ini, kami berikan apresiasi tentu tidak patut kalau kami tidak mendorong untuk penambahan anggaran ini.

Menurut hemat saya, ini berdiri *bulu roma* saya mengungkapkan ini. Mudah-mudahan Baleg, Badan Anggaran bersama Menteri Keuangan bisa memper, memberikan apresiasi terhadap capaian dengan bonus tambahan anggaran itu mudah-mudahan tidak dikurangi.

Barangkali demikian, Pimpinan.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. NASDEM):

Terima kasih, Pak Guspari Gaus.

Silakan, Pak Agung.

F-P GOLKAR (AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.):

Baik. Terima kasih, Pimpinan.

Karena ini adalah baru merupakan pagu awai, pagu indikatif dan, apa, postur APBN yang nantinya pada saat sidang istimewa itu nota keuangannya akan dibacakan oleh Presiden.

Kami ingin menyampaikan beberapa hal barangkali sifatnya kulit-kulitnya dulu, Pak. Kalau isinya nanti pada saat pembahasan materi RAPBN-nya.

Yang pertama, terkait dengan kelembagaan ORI. Tadi saya *ngobrol-ngobrol*, Ketua ORI sudah berapa kali ke negara tempat pertama kali lahirnya ORI. Katanya belum pernah, Pak. Ini setidaknya perlu ada studi orientasi. Karena di periode yang lalu Komisi II kita sudah pernah datang ke sana dan memang di sana Ombudsman Ini punya gigi, Pak. Sedangkan kita sifatnya rekomendasi, rekomendasi, rekomendasi yang acap kali tidak banyak dipatuhi oleh para pembuat kebijakan.

Dari laporan ini, kami mencoba melihat dengan kaca mata 2023 karena kami *enggak* bisa sampai ke satuan tiga ya, Pak, ya. Penyelesaian-penyelesaian laporan ini, kami berharap nanti di dalam pembahasan RAPBN lebih dipertajam lagi. Tidak hanya berdasarkan angka-angka yang tertera di dalam dokumen Undang-Undang APBN dan juga kemudian persentase serapan, ya.

Kami perlu ada catatan, jejak tapak dari penyelesaian laporan-laporan terkait dengan malpraktik kebijakan ini, ya. Tingkat rekomendasi yang diberikan terus kemudian kepatuhannya berapa persen. Kemudian, maaf kalau dibidang pembangkangan, pembangkangan ya, karena acap kali tidak diindahkan, tidak ditindaklanjuti, itu pun juga berapa persen.

Sekaligus ya, di sini kami melihat diagram sangat senang sekali bahwa di antaranya ada varian-varian malpraktik yang disebutkan terkait penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, tidak memberikan pelayanan.

Lah ini, di dalam pembahasan RAPBN ke depan itu kalau bisa Pak, disebutkan satuan kerjanya, Pak, sehingga kita lebih spesifik. Misalkan, lembaga atau kementerian yang berkewajiban memberikan layanan publik terkait dengan produk layanan publik tertentu tetapi dia tidak mau memberikan atau lambat menyelesaikan bahkan terjadi penyimpangan prosedur.

Nah, dari temuan-temuan ini yang bersifat spesifik, kami ingin *exercise* nanti ketika ketemu dengan lembaga/kementerian terkait sebagai mitra kami. Itu, yang pertama.

Kalau dari sisi perangkaan tentang penambahan dan sebagainya. Saya selalu *support*. Mudah-mudahan saja pemerintah memiliki, apa, kemampuan anggaran untuk di 2025 cukup ya Pak ya, karena ini kan pemerintahan transisi.

Kemudian untuk arsip negara. Pertama saya tidak akan jemu-jemunya saya mengapresiasi. Di laman medsos seperti Instagram itu sudah banyak produk-produk yang dimunculkan. Ini bagian dari mendukung kebijakan Pemerintah Pusat untuk bagaimana melakukan percepatan, apa, kegiatan pemerintahan berbasis digital begitu.

Tetapi dari konten-kontennya, saya melihat masih, masih banyak yang perlu ditingkatkan kembali, begitu. Kalau kemudian hanya, maaf-maaf dalam tanda petik, "comot sana comot sini" punya netizen, saya rasa itu bukan kinerja Arsip, apa, ANRI yang sesungguhnya, begitu.

Misal, ada gambar radio transistor, ada pita kaset yang menggunakan, apa itu, pita ya menggunakan pita itu. Kemudian ada barang-barang yang model dulu asahan atau rautan pensil dan sebagainya, itu punya netizen, Pak. Saya minta ANRI harus punya produk sendiri, begitu loh.

Tadi kebetulan kok *nyinggung* tentang Pemilu, ya Pak, ya. Ini peristiwa sejarah, ini saya minta jangan lepas dari liputan ANRI, harus ada jejak tapaknya. Secara spektakuler pertama kali di dunia serempak memilih Presiden sampai eksekutif dan legislatif dari pusat sampai daerah dengan anggaran yang cukup fenomenal juga, itu harus terdeteksi di sana.

Tetapi ada catatan-catatan juga, walaupun ini di luar, di luar konteks tugas pokok dan fungsi. Kita angkat *ad hoc* Bawaslu tapi masyarakat sulit mendapatkan produk dari Bawaslu itu yang setiap TPS itu ada.

Terakhir, ini ada beberapa hal, Pak. Pemerintah bersama-sama dengan DPR dalam hal ini Komisi II telah berhasil melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pembentukan Pemerintah Daerah, Provinsi, Kabupaten/Kota. Di sana dinahkodai oleh Pimpinan-Pimpinan Komisi II yang cukup handal, Pak. Sidang singkat tetapi semua peraturan perundangan terkait dengan pendirian Pemerintah kabupaten/kota dan provinsi sudah terselesaikan dengan rasa Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Nah, tetapi Pak. ada yang menarik lagi di sana. Ada temuan-temuan tentang hari jadi Pemerintah Provinsi yang ternyata terkoreksi berdasarkan catatan sejarah ternyata bukan tanggal, bulan, tahun tersebut. *Lah* ini harus terdeteksi, harus harus tercatat, begitu Pak.

Saya sadar dan yakin bahwa sejarah ini adalah inspirasi masa depan. Maka ketika hari ini kita mencatat prestasi yang ditempuh oleh Pemerintah bersama-sama DPR bisa jadikan catatan sejarah, tentu akan menginspirasi ke depan juga.

Lalu, kami terima kasih Pak. Kami pernah sosialisasi bersama ANRI di daerah menghadirkan semua OPD dan Pemerintah Desa. Tolong Pak, kearifan lokal di tingkat desa ini pun juga ada jejak tapak sejarah yang perlu diarsipkan. Entah itu secara perjuangan ataupun juga produk-produk administrasi tata pemerintahan desa. Bagaimana sertifikat pada saat itu disimpan dalam

bumbung dan sebagainya. Apakah sudah dicatat atau belum. Saya waktu Jadi pengacara dulu pernah menangani.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. NASDEM):

Pak Agung setuju enggak dengan anggaran yang diajukan ANRI?

F-P GOLKAR (AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.):

Anggaran setuju, Pak.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. NASDEM):

Iya, nanti yang lain-lain nanti pada pembahas rapat kerja yang lainnya saja.

F-P GOLKAR (AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.):

Iya karena ini kan ada RKP-nya, Pak. Karena ada RKP-nya, saya ingin di dalam RUU APBN besok tolong yang ini dimasukkan, begitu loh, Pak. Terima kasih.

Saya setuju 100%. Bahkan saya akan perjuangkan itu sampai titik darah penghabisan kalau ada duitnya, begitu ya, Pak.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. NASDEM):

Silakan, Pak Difriadi.

F-P GERINDRA (Drs. H. Difriadi):

Iya. Terima kasih, Pimpinan.

**Yang kami hormati Pimpinan Komisi, dan
Anggota Dewan,
Ketua LAN,
Ombudsman, dan
ANRI,**

Pada dasarnya, mula-mula dulu, ya. Bahwa pada dasarnya setuju atas tambahan itu tapi ada beberapa pendalaman.

Yang pertama untuk Ombudsman, apakah sudah ada koordinasi dengan persiapan untuk IKN itu apa perlu sudah ada akan dibangun kantornya di IKN atau nah tadi kan bilang masih sudah 30 tahun, sewa dan, apa, beli generator segala macam itu. Nah, apakah perlu sewa aja sementara dulu

karena nanti pindah juga nanti? Atau memang harus memang beli yang baru? Nah, itu pendalaman materi khusus untuk itu untuk ORI.

Tapi yang penting saya harapkan *nih* Pak, masukan untuk ORI, tolong publikasi, Pak. Publikasinya *dibanyakin*, Pak ORI ini, bukan sosialisasi saja. Oke lah sosialisasi sama kita Komisi II, mitra *oke*. Tapi publikasi ke masyarakat *banyakin*, Pak. Jangan sampai kalah dengan lapornya Pan itu, apa, Menpan itu ada si lapor itu, itu saya di mana-mana udah ada terus itu, di bis, kereta, semua ada.

Kalau, jadi begini contoh Pak, provokatif sedikit, lah. Kalau Anda susah di pelayanan publik, ada ORI. Nah begitu, ada Ombudsman karena orang banyak enggak tahu itu, Ombudsman tuh. Nah oleh karena itu, *complement* siap tindaklanjuti.

Kemudian apa yang disampaikan itu setelah ditindaklanjuti sudah dapat rekomendasi dari ORI, secara rinci harus diketahui siapa yang menindaklanjuti, siapa yang membangkang. Nah, supaya nanti pada saat di sini bisa dikontrol itu.

Nah, kita berterima kasih nih, ORI. Oleh karena itu, sebenarnya anggaran ini masih kecil menurut saya. Publikasinya perlu banyak-banyak nih.

Kemudian khusus untuk LAN, saya minta saya sependapat itu tambahan anggaran untuk teknologi, teknologi tadi ya, apa namanya tadi, Bakom tadi, ya? Nah, yang kompetensi itu, kompetensi aparatur dengan teknologi.

Cuma begini, Pak. Kita jangan sampai juga terjebak betul dengan teknologi itu. Jadi itu hanya alat untuk meningkatkan kapasitas kompetensi aparatur tapi yang penting itu adalah nilai-nilainya tetap harus tetap terjaga. Nilai-nilai aparatur negara yang akan dibangun oleh ASN sehingga tahu kita, *nih*.

Output-nya kompetensi ASN itu mau ke mana dibawa? Apa mau jadi politisi? Atau jadi birokrat saja? Karena kadang-kadang birokrat juga sudah mau jadi politisi setelah jadi Pj, iya kan? Ditunjuk Pj. Pj. wah sudah, banyak ternyata ahli juga, politisi juga ternyata, begitu Pak. Jadi, memang harus *output*-nya harus jelas dalam konteks pendidikan dan latihan di LAN, saya kira itu.

Tapi kalau untuk ANRI, kalo Bu Jangan dikit-dikit ... (suara tidak jelas) Bu, ANRI ini walaupun, ini harus *digedein* betul, karena apa? ANRI ini kadang-kadang kita, kita lupa *nih* pemain belakang ini, pemain belakang ini.

Jadi, perlu ada yang besar yang ambisius lah dikit lah ANRI ini. Karena ketahuan *tuh* bahwa kita itu meletakkan posisi arsip itu jangan pemain belakang. Jadi *show* dikit lah, ada ada yang *show* dikit, Bu.

Saya kira pada dasarnya itu, Pak Pimpinan. Intinya setuju dan kalau bisa memang perlu diperjuangkan sampai keringat terakhir, keringat terakhir, teringat terakhir.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. NASDEM):

Waalaikumsalam warahmatullah.

Terima kasih, Pak Difriadi.

Silakan, Pak Amin.

F-P NASDEM (AMINUROKHMAN, S.E., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang,

Salam sejahtera untuk kita sekalian,

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi II,
Kepala ANRI,
Ombudsman, dan
LAN,**

Dari sisi anggaran, mungkin saya memberikan berapa catatan.

Yang pertama, untuk LAN. Tahun 2023 itu anggaran yang di pagu indikatifnya 258 sekian terserap 99,5%. 2024, 312 milliar dan 2025, 315 tapi ada usulan tambahan 121, ya Pak ya?

Secara prinsip, dari anggaran yang dijabarkan dalam paparan tadi, kami mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh LAN dalam rangka untuk memenuhi apa yang menjadi program prioritas dari LAN terutama untuk pengembangan sumber daya manusia di kalangan ASN. Karena bagaimanapun juga, ASN ini menjadi sumber daya manusia yang kita andalkan ke depan bisa membangun birokrasi yang mumpuni.

Reformasi birokrasi yang berjalan hari ini, kami masih melihat itu tidak bisa dilepaskan dengan mentalitas, ya. Maka, LAN yang punya program dari penjabaran tadi nanti di dalam pembahasan detailnya akan kita alami lagi, Pak.

WF

Tapi yang perlu saya tanyakan, tambahan usulan 121 ini sejauh mana Bapak bisa mengalokasikan pada skala prioritas program yang berbasis pada peningkatan sumber daya manusia di birokrasi itu, Pak? Poinnya di situ.

Yang kedua, ORI. ORI ini 2023 anggarannya 239.57 sekian miliar, 2024 248, dan 2025 232, usulan tambahannya 133. Melihat ORI ini perannya di masyarakat sebetulnya sangat kehadirannya sangat dibutuhkan, Pak, ya.

Kami pernah bersama ORI melakukan sosialisasi tentang eksistensi lembaga ini. Respons publik positif, Pak. Tapi ketika laporan-laporan itu sudah masuk, eksekusinya publik ini kadang-kadang mempertanyakan, konkretnya seperti apa?

Tapi dari data yang sudah dilaporkan tadi sudah di, diambil satu keputusan dan sudah ada tindak lanjut. Tentu pertanyaan saya dari usulan tambahan ini kalau saya lihat nomenklatur anggaran yang ada kegiatannya, tapi anggarannya enggak ada Pak, ini lembaga ini bagaimana, Pak?

Contoh ya, fasilitasi pelayanan teknis pengawasan pelayanan publik, pagu indikatifnya nol Pak. Padahal ini menyangkut kepentingan masyarakat, betul ya Pak, ya? Data Bapak benar, ya?

Kemudian juga Kehumasan Data dan Sistem Teknologi Informasi. Lah inilah yang akhirnya Ombudsman ini tidak *booming* di kalangan publik, karena apa? Anggarannya saja enggak ada, Pak, ya.

Kemudian juga kaitan dengan pengawasan internal, oke kalau pengawasan internal itu secara fungsional bisa dilakukan oleh, oleh Pimpinan dengan jajaran terkait.

Tapi yang ngeri ini di sini Pak, Hukum Kerja Sama Organisasi dan Reformasi Birokrasi, itu juga 0, Pak. *Loh* lembaga ini ada, tapi enggak ada anggarannya. Yang lebih ngeri lagi, Kesejekan enggak ada anggarannya Pak, betul ya Pak, ya? *Lah*, ini lembaga negara apa organisasi yang seperti apa?

Maka saya sangat mendukung kalau ORI ini ingin menghadirkan eksistensinya di publik dengan *support* usulan anggaran 133 miliar sekian. Itu saya kira Komisi II yang hadir hari ini, itu pasti mendukung Pak, ya.

Namun, bagaimana Pimpinan di ORI bisa memastikan, meyakinkan Kementerian Keuangan bahwa Lembaga ini memang hadirnya memang dibutuhkan masyarakat.

Kami kebetulan di Baleg sama teman Pak Gaus revisi Undang-Undang ORI ini sedang berlangsung, Pak. Secara materi, rumusan pasal, dan sebagainya kita ingin memperkuat eksistensi ORI. Tapi kalau anggarannya aja dari urusan internal aja enggak beres, eksternalnya keluar bagaimana, Pak? Oleh karena itu, saya butuh penjelasan Pak ini.

Yang berikut ANRI, secara umum dari semua paparan yang disampaikan kami dukung, ya. Karena arsip nasional ini bagaimanapun juga menjadi dokumen yang akan kita wariskan pada generasi berikutnya agar perjalanan bangsa ini bisa teridentifikasi. Sejauh mana arsip nasional ini bisa menjadi bagian yang bisa menjadi informasi sekaligus dokumentasi yang legal, yang dikelola oleh satu lembaga negara.

Kaitan dengan usulan tambahan 239 miliar dari anggaran yang dialokasikan pagu indikatifnya 251, ya Bu, ya? 251 sekian miliar, ya? Usulan tambahannya 239, benar? Iya betul, ya?

Oleh karenanya, saya kalau dari sisi anggaran nanti kita bahas lebih detail dari apa yang sudah diusulkan sehingga pembahasan nanti akan lebih komprehensif apa saja yang.

Saya kira ini Pimpinan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. NASDEM):

Waalaikumsalam.

Pak Amin, terima kasih.

Silakan, Pak Kamran.

F-P NASDEM (KAMRAN MUCHTAR PODOMI, S.T.):

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom,*

**Pimpinan yang saya hormati,
LAN,
Arsip,
Ombudsman yang saya hormati,**

Kita langsung saja. Yang pertama, ingin mengatakan bahwa apa yang menjadi usulan tadi diterima. Tetapi untuk LAN dan Arsip, mungkin yang dari sisi pendapatan ya dalam pendalaman nanti harus diurai itu, paling tidak dijelaskan pada kami lah. Penerimaan Negara Bukan Pajak, itu pada pendalaman apa-apa saja untuk LAN dan Arsip, ya. Karena kan ini sisi bisnisnya ini. Kalau bisa ditingkatkan kenapa tidak ditingkatkan? Kira-kira begitu, ya. Karena ini kan dia secara umum.

uf

Kemudian rata-rata, rata-rata di penganggaran ini Dukungan Manajemennya lebih besar daripada program kegiatannya, juga nanti di pedalaman untuk dijelaskan.

Khusus Ombudsman, ini saya ini pengagum barang ini karena saya ini orang kampung. Ombudsman itu sampai di kampung saya, Pak. *Nah*, saat-saat seperti ada penerimaan ASN ini, lembaga ini sangat berfungsi di tingkat bawah. Tetapi lagi-lagi seperti yang dikatakan pembicara awal tadi bahwa tingkat eksekusinya itu jadi masalah. *Nah*, ini koreksi ya kepada Ombudsman ini, ke depan ini harus lebih ditingkatkan. Karena kalau namanya publik begitu dia merasa dia terancam dari sisi hak, maka yang dia akan tuju pasti lembaga publik.

Nah, kalau Ombudsman yang sebagai lembaga publik yang memang tugasnya itu, kemudian tidak mengeksekusi itu maka lama-lama keras di masyarakat itu akan menjadi problem. *Nah* mungkin itu, jadi secara prinsip kita semua akan mendukung bahwa memang, tetapi kita harus pintar membaca, ya.

Ketiga lembaga ini siap juga IKN, ya? Kita mulai misalnya di kementerian lain tadi disinggung oleh Pak Gaus, ATR/BPN saja dikurangi, tapi, sehingga sudah lebih di-*stressing* arahnya ke mana seperti Ombudsman tadi. Kalau memang lift-nya tadi masalah ya, *nah*, itu *stressing*-nya akan ke sana supaya tidak mengharapakan yang besar tiba-tiba tidak keluar anggarannya.

Nah, ini, jadi lebih kepada mana yang diutamakan karena Kita tahu bersama IKN membutuhkan dana yang luar biasa. Bahkan ada dari kementerian sudah saling ancam-mengancam karena faktor itu. Oleh sebab itu, kita menentukan anggaran mana yang menjadi paling utama.

Mungkin itu, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. NASDEM):

Walaikumsalam.

Terima kasih, Pak Kamran.

Jadi Bapak/Ibu sekalian,

Oh, Pak Endro.

Silakan, Pak Endro.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Terima kasih, Pimpinan.

WF

Sedikit saja.

Yang pertama, tadi sudah banyak diungkapkan sama kawan-kawan Komisi. Ini saya hanya ingin menggarisbawahi saja untuk masuk ke dalam pembahasan anggaran.

Dari ini pembahasan awal, saya minta dari baik ORI, LAN, maupun Arsip Nasional ini, ini kan sebenarnya lembaga-lembaga yang penting bagi negara dalam kehidupan berdemokrasi dan juga menyongsong, apa namanya, perkembangan zaman. Ini kan *connecting*-nya itu dengan Kementerian PAN RB, ini masalah sumber daya manusianya.

Kita lihat dari semua usulan yang ada, ini nampaknya perlu nanti di dalam pembahasan itu usulannya itu dipertajam lagi dalam sisi menggunakan teknologi informasi sebagai penggerak utama, karena kita tidak mungkin sekarang lepas dari yang namanya teknologi informasi.

Jadi usulan-usulan yang ada, itu dalam bentuk yang bagaimana diarahkan kita, apa, menyongsong atau mengadopsi 4.0 atau 5.0. Supaya apa? Investasi, apa usulan-usulan yang begitu banyak ini, ini lebih baik ke teknologinya, karena apa? Karena itu enggak ada gunanya.

Umpamanya, kita lihat sekarang perlu dikaji ulang di dalam pendidikan kaitannya dengan LAN mungkin, pendidikan. Sekolah-sekolah itu apa perlu kita investasi gedung yang mahal-mahal, *toh* teknologi informasi bisa, apa namanya, menjawab itu. Tidak harus kumpul di sini dan sebagainya. Ini yang membuat pendidikan menjadi mahal, belum pemeliharannya dan sebagainya. *Toh* nanti itu kan seperti Universitas Terbuka itu menjadi sebenarnya sebagai, apa, contoh konkret bahwa memanfaatkan teknologi informasi.

Nah, lembaga ini ORI, LAN, maupun Arsip Nasional juga seharusnya sudah mempunyai paradigma ke sana. Jadi, termasuk juga kaitannya dengan, apa, dukungan manajemen. Ini saya lihat teknologi informasi ini hanya *supporting*-nya. Ini kalau bisa di dibesarkan untuk apa, untuk menyongsong efisiensi yang ada. Enggak akan enggak akan ketemu sampai kapanpun kalau kecuali kita punya duit banyak. Anggaran kita terbatas, tahun ini juga akan bayar bunga hutang, 2025 ini tahun-tahun yang sulit. *Nah* ini harapannya, harapannya ini coba di apa disisir lagi paradigma usulannya itu meletakkan teknologi di depan. Itu itu yang pertama.

Yang kedua untuk ORI. ORI ini cukup bagus. Ini dampak dari perkembangan teknologi informasi. Ini akhirnya kesadaran masyarakat juga bertambah. Dampaknya lagi juga, ORI kewalahan juga. Ini juga memang harus diimbangi juga dengan anggaran yang besar. Semakin melek masyarakat, semakin pendidikannya bagus, kesadarannya bagus, ini tuntutan ke ORI juga tinggi untuk menyelesaikan. Ini juga harus dijawab selain anggaran tambah, saya lihat ini tadi Kesekjenan ada yang nol dan sebagainya. *Oke*, kita sepakat menambah anggaran tapi juga, juga ingin ini dijawab juga dengan teknologi juga. Sama juga dengan LAN dan sebagainya.

Perspektif teknologi itu menjadi penggerak utama di dalam menyongsong ke depan. Demokrasi kita sudah *amblek* enggak karuan, sekarang demokrasi cacat. *Nah*, ini tugas dari ORI dan sebagainya. Ini juga harus membangun, apa namanya, ekosistem demokrasi yang lebih baik lagi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. NASDEM):

Terima kasih, Pak Endro.

Ada apa, Ibu?

Tadi enggak tanya. Sekarang silakan Bu Munawaroh.

F-PPP (Dra. Hj. MUNAWAROH):

Iya. Terima kasih, Pimpinan dan mitra.

Yang pertama dari untuk Lembaga Administrasi Negara. Ini kalau capaiannya di 2023 99% kemudian 2024 sampai Juni ini 39, mungkin bisa, apa, diinformasikan capaian yang sama di bulan yang sama tahun 2023.

Kemudian untuk Arsip, arsip ini sangat penting dan selama ini tadi yang dilaporkan adalah arsip-arsip yang terkait dengan milik negara. Bagaimana sosialisasi ataupun bantuan terhadap lembaga-lembaga di luar lembaga negara? Misalnya organisasi sosial kemasyarakatan ataupun juga partai politik.

Mungkin itu yang perlu ditambahkan karena pentingnya arsip ini sehingga lembaga-lembaga yang ada di luar lembaga negara ini perlu juga dibantu.

Saya kira itu, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. NASDEM):

Terima kasih.

Cukup, ya.

**Bapak/Ibu Anggota Komisi II DPR RI, dan juga
Kepala LAN,
Kepala ANRI, dan
Ketua ORI,**

Karena ini baru pembahasan awal pagu indikatif, jadi masih ada dua tahap lagi kita nanti pembahasan yang secara mendalam. Nanti biasanya kita lakukan di konsyering dan habis itu kita bawa lagi ke rapat kerja atau rapat dengar pendapat.

Nah, untuk hari ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak/Ibu Anggota Komisi II yang sifatnya masukan, catatan, lain sebagainya itu perlu dicatat sebaik-baiknya, baik oleh LAN, ANRI, maupun ORI yang nanti akan kita bahas di pembahasan berikutnya.

Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari para Anggota Komisi II, saya juga meminta agar ORI, LAN, dan ANRI itu memberikan jawaban secara tertulis yang nanti akan kita dalam, akan kita bahas lagi pada rapat lanjutan terkait dengan pembahasan RAPBN Tahun 2025 ini.

Nah, untuk itu selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan rapat kita pada hari ini.

Tampilin.

Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan Ombudsman Republik Indonesia.

1. Komisi II DPR RI telah menerima penjelasan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebagai berikut:

a. LAN

- Realisasi APBN Tahun 2023 sebesar Rp326.795.085.559,00 dari Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp329.099.461.000,00 atau sebesar 99,30%;
- Realisasi APBN Tahun 2024 per 11 Juni 2024 sebesar Rp122.729.004.584,00 dari Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp312.277.135.000,00 atau sebesar 39,30%;
- Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2025 sebesar Rp315.388.668.000,00.

b. ANRI

- Realisasi APBN Tahun 2023 sebesar Rp264.771.351.000,00 dari Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp267.670.167.000,00 atau sebesar 98,92%;
- Realisasi APBN Tahun 2024 per 10 Juni 2024 sebesar Rp135.276.070.253,00 dari Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp282.425.872.000,00 atau sebesar 47,90%;
- Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2025 sebesar Rp251.995.636.000,00.

c. ORI

- Realisasi Tahun 2023, Rp227.552.664.570,00 dari Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp239.573.667.000,00 atau sebesar 94,98%;

NS

- Realisasi APBN Tahun 2024 per 10 Juni 2024 sebesar Rp96.332.957.564,00 dari Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp206.183.560.000,00 atau sebesar 46,72%;
- Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2025 sebesar Rp232.211.000.019,00.

Setuju, ya?

(RAPAT: SETUJU)

2. Terhadap usulan tambahan anggaran yang diusulkan oleh LAN, ANRI dan ORI sebagai berikut:
 - Usulan tambahan anggaran tahun 2025 LAN sebesar Rp121.887.230.253,00;
 - Usulan tambahan anggaran tahun 2025 untuk ANRI sebesar Rp239.366.284.000,00;
 - Usulan tambahan anggaran tahun 2024 untuk ORI sebesar Rp12.300.000.000,00;
 - Usulan tambahan anggaran tahun 2002, tadi 2024 ya, usulan tambahan anggaran tahun 2025 untuk ORI sebesar Rp201.728.215.000,00;

Komisi II DPR RI akan membahas secara mendalam pada RDP yang akan datang.

Jadi pada prinsipnya, Komisi II DPR RI selalu mendukung terhadap mitra kerja dalam soal anggaran, baik dari anggaran yang sudah ada dalam Pagu indikatif maupun usulan anggaran tambahan.

Setuju, ya? Nanti kita bahas.

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi II DPR RI meminta kepada LAN, ANRI, dan ORI untuk segera menyampaikan Alokasi Anggaran Tahun 2023 dan tahun dan Alokasi Anggaran Tahun 2024 beserta rinciannya sesuai dengan jenis belanja dan kegiatan atau satuan figa serta target dan capaian kinerja kepada Sekretariat Komisi II DPR RI sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN tahun 2025 yang akan datang.

Setuju, ya?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak/Ibu sekalian,

Pimpinan mengucapkan terima kasih kepada saudara Kepala LAN, Kepala ANRI, Ketua Ombudsman RI beserta jajaran serta Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang telah hadir pada rapat hari ini.

wf

Dengan demikian, rapat kita akhiri.

Billahi taufik walhidayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.27 WIB)

Kita langsung dengan mitra berikutnya. Jadi habis ini baru kita istirahat. Salatnya masing-masing saja, giliran.

**a.n. KETUA RAPAT
KABAG SET. KOMISI II DPR RI**



Dahliya Bahnan, S.H., M.H.
197504202002122002

